



RENCANA AKSI KEGIATAN

TAHUN 2020 - 2024

PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN



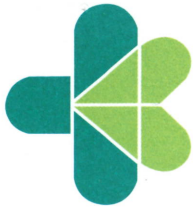
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon (021) 724 5517 - 7279 7508 Faksimile (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR. HK.02.03/4/ 7038 /2020
TENTANG
RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN
TAHUN 2020-2024

- Menimbang :
1. bahwa tugas pokok Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 2. bahwa dalam melaksanakan tupoksi Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan diperlukan dokumen perencanaan 5 (lima tahunan) dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005- 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, dan Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan tahun 2020-2024;
 3. bahwa dokumen Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SOM Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan oleh penanggung jawab/pelaksana kegiatan di lingkungan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan dan para pemangku kepentingan;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1, huruf 2, dan huruf 3, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tentang Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2004 No.104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembar Negara Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 6. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5609);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon (021) 724 5517 - 7279 7508 Faksimile (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



10. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
15. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor: HK.02.03/1/1558/2020 Tentang Rencana Aksi Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2020 - 2024;**
- KEDUA : Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2020 - 2024 digunakan sebagai acuan bagi seluruh penanggung jawab/pelaksana kegiatan di lingkungan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan dalam menyusun perencanaan tahunan dan penyelenggaraan program pembangunan kesehatan;
- KETIGA : Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2020 - 2024 yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2020 - 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : **4** Desember 2020



Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

SUGIYANTO

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan di Jakarta;
4. Para Penanggungjawab/Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan.

KATA PENGANTAR



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. RPJMN tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan melalui Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes) Tahun 2020 – 2024. Untuk dapat mencapai target indikator yang telah ditetapkan tersebut maka unit utama/Eselon I dapat menyusun Rencana Aksi Program 5 (lima) tahunan

sebagai penjabaran dari Renstra Kementerian, dan Unit Eselon II dapat pula menyusun rencana kegiatan 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Aksi Program Eselon I.

Rencana Aksi Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan ini berisi upaya untuk mendukung sasaran program Badan PPSDM Kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan, target indikator termasuk kerangka regulasi dan pandanaannya yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan lima tahun ke depan.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak atas perhatian, bantuan maupun masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini. Dengan memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan strategis dalam pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan di masa depan, Rencana Aksi Kegiatan ini dapat diadakan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhannya.

Kiranya Rencana Aksi Kegiatan ini dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang terkait dan terlibat langsung atau tidak langsung dalam pengembangan dan pengelolaan pendidikan SDM kesehatan.

Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan,

Dr. Sugiyanto, S.Pd, M.App, Sc

NIP. 196607221989031002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum, Potensi, dan Permasalahan	3
C. Maksud dan Kegunaan	9
D. Dasar Hukum	9
E. Sistematika Penulisan	11
F. Daftar Istilah	11
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN	15
A. Visi	15
B. Misi	15
C. Tujuan	16
D. Sasaran Strategis	16
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	19
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Kesehatan	19
B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kesehatan	19
C. Arah Kebijakan dan Strategi Badan PPSDM Kesehatan	20
D. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	21
E. Kerangka Regulasi	24
F. Kerangka Kelembagaan	25
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	26
A. Target Kinerja Pada RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024	26
B. Target Kinerja Pada Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2020-2024	27
C. Target Kinerja Pada Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024	28
D. Kerangka Pendanaan	39
BAB V. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN	41
A. Pemantauan	41
B. Penilaian	41
BAB VI. PENUTUP	43
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Stretegis Kementerian Kesehatan	16
Tabel 4.1	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Pendidikan SDM Kesehatan pada RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Cascading Indikator Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Dengan Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Dan Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2020-2024	44
Lampiran 2	Matriks Target Kinerja Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2020	45
Lampiran 3	Matriks Target Kinerja Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2021 – 2024	47
Lampiran 4	Matriks Kerangka Pendanaan Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2020	58
Lampiran 5	Matriks Kerangka Pendanaan Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2021 – 2024	60
Lampiran 6	Matriks Kerangka Regulasi Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2020 – 2024	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan :

1. Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi dan respon terhadap ancaman kesehatan global;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh;
3. Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan *Healthy Adjusted Life Expectancy* (HALE).

Namun, untuk mencapai tatanan masyarakat di atas masih terdapat permasalahan bidang kesehatan dari segi 1) Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih jauh dari target global Sustainable Development Goals (SDG's) untuk menurunkan AKI menjadi 183 per 100.000 KH pada tahun 2024, 2) HALE orang Indonesia secara rerata 62,65 tahun, artinya terdapat 8,85 tahun yang hilang karena kualitas hidup yang buruk akibat menderita penyakit dan disabilitas, 3) Indonesia mengalami beban ganda, di satu sisi PTM naik dengan signifikan, namun masih dihadapkan pada penyakit menular yang belum tuntas, 4) ancaman kesehatan masyarakat lainnya yang tidak dapat diabaikan salah satunya adalah ancaman penyakit yang baru muncul seperti adanya pandemi covid 19 di tahun 2020 yang masih memerlukan kesiapsiagaan khususnya dalam menyiapkan sistem kesehatan yang mampu merespon kegawatdaruratan kesehatan masyarakat, 5) masalah krusial lain yang dihadapi adalah dalam pemenuhan SDM Kesehatan baik jumlah, sebaran

dan kualitas tenaga kesehatan. Kekurangan berbagai jenis tenaga kesehatan masih terjadi disejumlah fasilitas pelayanan kesehatan.

Kementerian Kesehatan menyusun arah kebijakan dan strategi untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang efektif dan efisien. Program-program yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus dan fokus kegiatan pembangunan kesehatan. Untuk itu, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) berupaya mendukung arah, kebijakan dan startegi Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar, sesuai dengan tugas Badan PPSDM Kesehatan pada, yaitu melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan (Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020). Sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan yang akan dicapai dalam pelaksanaan programnya selama 5 (lima) tahun dari tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut : 1) Puskesmas tanpa dokter sebesar 0 %, 2) terpenuhinya Puskesmas dengan jenis tenaga Kesehatan sesuai standar sebesar 83%, 3) terpenuhinya RSUD Kab/Kota yang memiliki dokter spesialis dasar dan spesialis lainnya sebesar 90%, 4) tersedianya SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 167.742 orang.

Sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan tersebut akan dicapai melalui kegiatan : 1) Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2) Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 3) Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 4) Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan, 5) Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, 6) Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan, 7) Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, 8) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program.

Kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan SDM Kesehatan. Pusat Pendidikan SDM Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan sumber daya manusia kesehatan (Permenkes Nomor 25 Tahun 2020). Pusat Pendidikan SDM Kesehatan melaksanakan sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan nomor 4 (empat) yaitu tersedianya SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya. Dalam rangka

mendukung sasaran strategis tersebut maka Pusat Pendidikan SDM Kesehatan menetapkan sasaran strategis tahun 2020-2024 sebagai berikut :

- a. Penyediaan bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK
- b. Penyesuaian prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu disusun Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2020 – 2024 untuk mendukung arah, kebijakan dan strategi dari Kementerian Kesehatan dan program Badan PPSDM Kesehatan yang memuat tujuan, sasaran dan pokok-pokok kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan (Pusdik SDM Kesehatan) dalam 5 (lima) tahun ke depan.

B. Kondisi Umum, Potensi, dan Permasalahan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 18 menyebutkan bahwa pembinaan teknis pendidikan tinggi bidang kesehatan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan pembinaan akademik pendidikan bidang kesehatan dilakukan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sehingga Badan PPSDM Kesehatan melalui Pusdik SDM Kesehatan melakukan pembinaan teknis terhadap institusi penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan.

Sejalan dengan hal tersebut sesuai dengan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015, maka Pusat Pendidikan SDM Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan sumber daya manusia kesehatan .

Dengan demikian, sesuai dengan tugas Pusdik SDM Kesehatan di atas, maka gambaran kondisi umum, potensi dan permasalahan bidang pendidikan sumber daya manusia kesehatan dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian program yang telah dilakukan sebelumnya dan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan sasaran strategi Pusdik SDM Kesehatan.

1. Pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan

Kondisi SDM Kesehatan saat ini terus membaik dalam jumlah, kualitas dan penyebarannya, namun belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah terutama pada daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata dan komposisi jenis tenaga yang belum berimbang masih menjadi permasalahan

dalam memenuhi standar tenaga kesehatan di Puskesmas sesuai Permenkes 75 tahun 2014. Adapun 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar adalah dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi dan ahli teknologi laboratorium medik.

Data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Badan PPSPDM Kesehatan terpenuhinya Puskesmas dengan jenis tenaga Kesehatan sesuai standar sebanyak 3.965 dari 10.230 Puskesmas (38,76 %). Disisi lain data mahasiswa kesehatan berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) Tahun 2019, saat ini jumlah mahasiswa bidang kesehatan ada sebanyak 532.935 orang yang berasal dari 3.640 prodi bidang kesehatan. Dimana nantinya mahasiswa tersebut akan menjadi tenaga kesehatan yang berpotensi untuk mengisi kekurangan tenaga kesehatan di Puskesmas dan fasyankes lainnya.

Saat ini jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan di seluruh Indonesia sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dikelompokkan sebagai berikut: a) tenaga medis: dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis, b) tenaga psikologis klinis: c) tenaga keperawatan: berbagai jenis perawat; (*keperawatan gigi dihapus karena nomenklturnya udah kesehatan gigi (DIII), terapi gigi (DIV)*) d) tenaga kebidanan: bidan; e) tenaga kefarmasian: apoteker, tenaga teknis kefarmasian (kalau dari UU), farmasi, analisa farmasi dan makanan; f) tenaga kesehatan masyarakat: tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, epidemiolog kesehatan, tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga, tenaga biostatistik dan kependudukan, dan tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan; g) tenaga gizi: nutrisisionis dan dietisien; h) tenaga kesehatan lingkungan: sanitasi lingkungan, entemolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan; i) tenaga keterapiian fisik: fisioterapi, okupasi terapi, terapis wicara, akupunktur; j) tenaga keteknisian medis: perekam medis dan informasi kesehatan, teknik gigi, penata anastesi, terapis gigi dan mulut, teknisi pelayanan darah; k) tenaga teknik biomedika: radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, radioterapis, fisikawan medis dan ortotik prosetetik; l) tenaga kesehatan tradisional: jamu; m) tenaga kesehatan lain.

Dari pengelompokkan tenaga kesehatan di atas, jenis pendidikan tenaga kesehatan yang diselenggarakan di 38 Poltekkes Kemenkes seluruh Indonesia sebanyak 21 jenis yang tersebar di 493 prodi (D-III : 290, D-IV/Sarjana Terapan

: 150, D-III PJJ : 4, Profesi : 45, S2 Terapan : 4) dengan jumlah mahasiswa sebanyak 101.585 orang dan lulusan yang dihasilkan dari Poltekkes Kemenkes pada tahun 2019 sebanyak 37.725 orang (data per 31 Desember 2019).

Berdasarkan data di atas, terdapat permasalahan pendidikan tenaga kesehatan yaitu masih kurang serasinya antara kebutuhan tenaga kesehatan di fasyankes dengan pengadaan jenis pendidikan tenaga kesehatan di institusi pendidikan bidang kesehatan. Sehingga perlu dilakukan sinkronisasi dan integrasi jenis penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan yang akan dikembangkan dengan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, agar pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dapat terlaksana sesuai standar.

2. Kemitraan dan Kerjasama Pendidikan SDM Kesehatan

Dalam rangka pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimana satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat dan tidak hanya arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.

Kementerian Kesehatan telah melaksanakan perjanjian kerjasama antar negara di ASEAN dalam hal pengiriman tenaga kesehatan, seperti pengiriman perawat ke Jepang atau Korea untuk penempatan di RS dan panti jompo. Selain untuk Negara ASEAN, permintaan pengiriman tenaga kesehatan Indonesia ke luar negeri cukup banyak antara lain Timur Tengah, Amerika, Eropa, Australia, dan lain-lain.

Menindaklanjuti hal di atas, Pusdik SDM Kesehatan sebagai pembina teknis Poltekkes Kemenkes dalam penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan telah memfasilitasi kerjasama Poltekkes Kemenkes dengan mitra baik di dalam maupun di luar negeri, untuk bidang pertukaran dosen dan mahasiswa ke luar negeri, penelitian dalam dan luar negeri, pengembangan kurikulum kelas internasional, akreditasi internasional, magang dosen dan mahasiswa dalam dan luar negeri dan lain-lain.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di dalam dan luar negeri diperlukan pendidikan tinggi bidang kesehatan yang berkualitas, khususnya di Poltekkes Kemenkes masih terdapat disparitas yang tinggi dari segi kualitas

pendidikan kesehatan. Disparitas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen, sumber daya manusia, kurikulum, proses belajar-mengajar, sampai sumber daya pendukung. Penyelesaian permasalahan disparitas kualitas pendidikan tenaga kesehatan dalam rangka peningkatan SDM Kesehatan yang profesional memerlukan kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak.

3. Penyelenggaraan Pendidikan SDM Kesehatan (Teknis dan Penunjang Pendidikan)

Sesuai dengan Permenkes 64 Tahun 2015 pasal 796 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Pusdik SDM Kesehatan adalah menyiapkan kebijakan teknis dan penyiapan pelaksanaan di bidang fasilitasi teknis pendidikan penunjang penyelenggaraan pendidikan SDM Kesehatan. Untuk itu Pusdik SDM Kesehatan melakukan upaya peningkatan kualitas tenaga kesehatan melalui pembinaan terhadap institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Sejalan dengan bertambah dan meratanya tempat-tempat pelayanan kesehatan, diperlukan penambahan berbagai jenis tenaga kesehatan, baik berupa penambahan jumlah maupun peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan. Selain itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat terutama di bidang kesehatan dan masyarakat yang semakin kritis, menuntut agar SDM kesehatan khususnya lulusan pendidikan bidang kesehatan dapat mengantisipasi perkembangan tersebut.

Kurikulum merupakan hal yang mendasar dan dianggap penting sebagai acuan bagi institusi pendidikan tenaga kesehatan dalam menjalankan proses belajar mengajar, selain itu kurikulum dalam proses pendidikan sangat diperlukan sebagai pedoman dan arah dalam interaksi antar seluruh elemen dalam proses belajar mengajar sehingga dapat dicapai kualitas lulusan yang handal dan profesional untuk menjawab tantangan di atas.

Namun, belum seluruh kurikulum disesuaikan dengan kurikulum pendidikan tinggi (KPT) yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Karena sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI dan dikokohkan dengan dicantumkannya KKNI dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, maka kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia menyesuaikan dalam penyusunannya dengan pola pikir yang berkembang saat ini.

Pusdik SDM Kesehatan telah melakukan fasilitasi penyiapan bahan kurikulum untuk 20 jenis prodi DIII, 16 jenis prodi DIV, 4 jenis Profesi, dan 4 jenis Prodi Magister Terapan. Proses Penyusunan kurikulum di Pusdik SDM Kesehatan berlangsung siklus maksimal 5 tahunan, dimana tahun ke-5 dilakukan revisi kurikulum untuk menjawab perkembangan IPTEKS, perubahan regulasi dan kebutuhan program Kemenkes. Kegiatan penyiapan bahan kurikulum ini akan menghasilkan kurikulum inti yang menjadi acuan bagi institusi pendidikan dalam mengembangkan kurikulum institusi. Dengan demikian, setiap lulusan pendidikan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia akan memiliki kompetensi inti yang sama sehingga berdampak pada meningkatnya pembangunan kesehatan di Indonesia.

Dharma lainnya dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi adalah kegiatan penelitian bagi dosen yang merupakan hal penting untuk menciptakan inovasi serta memenuhi tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya khususnya di bidang kesehatan guna meningkatkan pembangunan kesehatan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional.

Pelaksanaan penelitian yang berkualitas menghasilkan produk-produk inovasi dan respon terhadap kebutuhan masyarakat terutama di bidang kesehatan untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan publikasi penelitian dosen pada jurnal nasional dan internasional yang bereputasi masih sangat sedikit, yaitu berdasarkan data Kemenristek Dikti melalui aplikasi SINTA (*Science and Technology Index*) merupakan portal berisi pengukuran kinerja IPTEK dari peneliti, penulis, kinerja jurnal, kinerja institusi dalam penelitian, Poltekkes Kemenkes masih menduduki posisi peringkat tertinggi yaitu rangking 180 secara nasional dan posisi terendah yaitu rangking 3.275 secara nasional

Pengabdian masyarakat bagi dosen di institusi pendidikan tinggi juga masih harus dikembangkan dalam upaya melakukan pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Selain dosen, mahasiswa dituntut dapat ikut serta dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan mendiseminasikan hasil pengabmas.

Selain itu, tantangan dunia pendidikan tinggi di Indonesia pada era industri 4.0 dituntut untuk dapat mengatasi gejolak perubahan yang terjadi dikarenakan transformasi digital. Pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pilar dalam perguruan tinggi memegang peranan strategis dalam menghasilkan lulusan yang

memiliki daya saing dan siap berkompetisi di era industri 4.0. Dengan demikian, pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi inti keilmuan (*core competencies*) yang kuat, memiliki *soft skill*, kreatif, komunikatif

4. Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan SDM Kesehatan

Sebagai upaya untuk menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang berkualitas, bertanggung jawab, memiliki etika, moral yang tinggi, keahlian dan memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan kesehatan serta siap melaksanakan pembangunan kesehatan diperlukan peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPMPT) yang merupakan sistem untuk meningkatkan mutu institusi pendidikan secara berencana dan berkelanjutan, melalui sistem penjaminan mutu internal, pangkalan data perguruan tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal (akreditasi)

Akreditasi sendiri bertujuan untuk menentukan kelayakan program studi (prodi) dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi serta menjamin prodi dan perguruan tinggi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat sesuai dengan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi.

Data akreditasi prodi dan institusi Poltekkes Kemenkes per 31 Desember 2019 yaitu sebanyak 60 prodi terakreditasi A (13,92%), 352 prodi terakreditasi B (81,67%), 33 institusi terakreditasi B sehingga total Prodi dan Institusi yang terakreditasi minimal B sebanyak 445 Prodi dan Institusi. Namun, masih terdapat 19 prodi terakreditasi C (4,4%) dan 5 Poltekkes Kemenkes dalam proses akreditasi yaitu Poltekkes Kemenkes; Pangkal Pinang, Mamuju, Maluku, Sorong, dan Ternate. Selain itu, pada tahun 2021 terdapat prodi yang habis masa berlaku sebanyak 166 prodi (D-III : 107 prodi, D-IV : 59 prodi), prodi baru sebanyak 2 prodi dan 3 akreditasi institusi.

Disisi lain, pada tahun 2020 ini mulai diterapkan akreditasi 9 kriteria pertanggal 1 Januari 2020 sesuai dengan Surat Pengumuman Ketua LAM-PTKes Nomor 0250/SKU/K/03.2019 tanggal 13 Maret 2019 yang berarti bahwa akan ada penambahan penilaian semula 7 kriteria menjadi 9 kriteria bagi prodi

dan institusi Poltekkes Kemenkes. Untuk itu diperlukan upaya bagi prodi terakreditasi C, prodi yang habis masa berlaku, prodi baru dan institusi yang akan diakreditasi dalam membudayakan mutu dan meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu Pusdik SDM Kesehatan sudah melakukan pemetaan bagi prodi maupun institusi yang berpotensi untuk ditingkatkan akreditasinya dari peringkat B ke A bahkan akreditasi internasional masih memerlukan fasilitasi dan pemantapan agar meningkat hasil akreditasinya.

Sebagai upaya penjaminan mutu pendidikan selain pelaksanaan akreditasi di atas, kegiatan pengendalian mutu pendidikan perlu dilakukan melalui pemantauan penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan. Pemantauan yang dimaksud adalah suatu proses sistematis yang diselenggarakan untuk mencapai keberhasilan suatu penyelenggaraan pendidikan agar menghasilkan lulusan yang berkualitas. Untuk itu pemantauan dilakukan terhadap kualitas masukan (input), kualitas proses maupun kualitas hasil pelaksanaan (output).

C. Maksud dan Kegunaan

Rencana Aksi Kegiatan ini merupakan rencana kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2024 yang ditetapkan dengan maksud untuk memberi arah dan acuan bagi seluruh unit di lingkungan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan dan menggerakkan semua pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan SDM kesehatan.

Dengan ditetapkannya Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan ini, diharapkan seluruh kegiatan pendidikan SDM kesehatan yang dilakukan oleh semua unit kerja di lingkungan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan dan semua pemangku kepentingan lainnya dapat berkembang secara dinamis dan bersinergi, serta saling melengkapi dan saling mendukung.

D. Dasar Hukum

Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2020 – 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan Kegiatan Pendidikan SDM kesehatan dengan landasan penyelenggaraan, terutama :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembar Negara Nomor 5072);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
6. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan - 3 - Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

15. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : HK.02.03/I/1558/2020 Tentang Rencana Aksi Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

E. Sistematika Penulisan

Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tahun 2020 - 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : VISI, MISI DAN TUJUAN
- BAB III : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
- BAB IV : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
- BAB V : PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
- BAB VI : PENUTUP
-
- LAMPIRAN – 1 : CASCADING INDIKATOR RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENDIDIKAN KESEHATAN DENGAN RENCANA AKSI PROGRAM BADAN PPSDM KESEHATAN DAN RENCANA STRATEGIS KEMENKES TAHUN 2020-2024
- LAMPIRAN – 2 : MATRIKS TARGET KINERJA RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN
- LAMPIRAN – 3 : MATRIKS KERANGKA PENDANAAN RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN
- LAMPIRAN – 4 : MATRIKS KERANGKA REGULASI RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN

F. Daftar Istilah

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yakni tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari RPJPN 2005-2025, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

- 3) Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020- 2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenkes adalah dokumen perencanaan Kementerian Kesehatan untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024.
- 4) Kementerian Kesehatan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
- 5) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut Badan PPSDM Kesehatan adalah Unit Organisasi Eselon I di bawah Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.
- 6) Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut Pusdik SDM Kesehatan adalah Unit Organisasi Eselon II di bawah Unit Organisasi Eselon I Badan PPSDM Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan sumber daya manusia kesehatan.
- 7) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- 8) Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
- 9) Tujuan adalah penjabaran Visi dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas.
- 10) Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.
- 11) Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program untuk mewujudkan Visi dan Misi.
- 12) Prioritas adalah arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu

serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan.

- 13) Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran RPJMN dan kebijakan Presiden lainnya.
- 14) Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional.
- 15) Program Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Program adalah penjabaran Kebijakan Kementerian/ Lembaga di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- 16) Kegiatan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja Kementerian/Lembaga yang bersangkutan untuk menunjang Program yang telah ditentukan.
- 17) Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/ Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
- 18) Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
- 19) Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.
- 20) Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.
- 21) Indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program.
- 22) Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan.
- 23) Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.

- 24) Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
- 25) Klasifikasi Rincian Output (KRO) adalah kumpulan atas rincian output (RO) yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
- 26) Rincian Output (RO) adalah keluaran (output) riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian/ Lembaga yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Visi Presiden 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”**. Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu **“menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.”** Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tidak memiliki visi dan misi, namun mengacu pada visi dan misi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dan visi misi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

B. Misi

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Menurunkan angka stunting pada balita
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

C. Tujuan

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Badan PPSDM Kesehatan, mendukung tujuan strategis keempat Kementerian Kesehatan yaitu peningkatan sumber daya kesehatan, yang kemudian dijabarkan melalui sasaran strategis pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar. Dalam mendukung tujuan Badan PPSDM Kesehatan tersebut Pusat Pendidikan SDM Kesehatan menetapkan tujuan strategis yaitu :

1. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan melalui Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan pada tahun 2024 yaitu sebanyak 1.500 orang.
2. Penyesuaian pendidikan SDM Kesehatan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan baik secara kuantitas maupun kualitas pada tahun 2024 yaitu sebanyak 206 prodi dan lembaga.

D. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Stretegis Kementerian Kesehatan

No	Tujuan Strategis	No	Sasaran Strategis
1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	1	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat

No	Tujuan Strategis	No	Sasaran Strategis
2	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	2	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	3	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4	Peningkatan sumber daya kesehatan	4	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
		5	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
		6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	7	Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
		8	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Dalam sasaran strategis Kementerian Kesehatan tersebut, Badan PPSPDM Kesehatan mendukung sasaran strategis nomor 5 (lima) yaitu meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar, yang kemudian dijabarkan dalam Sasaran strategis Badan PPSPDM Kesehatan yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Puskesmas tanpa dokter sebesar 0 %
2. Terpenuhinya Puskesmas dengan jenis tenaga Kesehatan sesuai standar sebesar 83%
3. Terpenuhinya RSUD Kab/Kota yang memiliki dokter spesialis dasar dan spesialis lainnya sebesar 90%

4. Tersedianya SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 167.742 orang

Pusat Pendidikan SDM Kesehatan melaksanakan sasaran strategis Badan PPSPDM Kesehatan nomor 4 (empat) yaitu tersedianya SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya. Dalam rangka mendukung sasaran strategis tersebut maka Pusat Pendidikan SDM Kesehatan menetapkan sasaran strategis tahun 2020-2024 sebagai berikut :

- a. Penyediaan bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK
- b. Penyesuaian prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan

Pada tahun 2020, berdasarkan rapat dengan Bappenas, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Badan PPSPDM Kesehatan, terdapat pemindahan sasaran strategis dari Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi ke Kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan yaitu pada sasaran strategis Tenaga Kesehatan Lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI Yang Didayagunakan Di Fasyankes Pemerintah. Pada RAK Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2020-2024 ini belum memasukkan sasaran strategis tersebut karena masih menyesuaikan dengan sasaran strategis yang terdapat pada Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Kesehatan

Arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu

- a) Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi;
- b) Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda;
- c) Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d) Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan
- e) Penguatan sistem kesehatan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kesehatan

Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni meningkatkan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka ditetapkan arah kebijakan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

- 1) Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta.
- 2) Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
- 3) Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
- 4) Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi.

- 5) Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program.

Kelima arah kebijakan Kementerian Kesehatan tersebut digunakan sebagai pemandu dalam menyusun Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan 2020- 2024.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Badan PPSPDM Kesehatan

Arah Kebijakan Badan PPSPDM Kesehatan ditetapkan dalam rangka mendukung arah kebijakan Kementerian Kesehatan. Dalam arah kebijakan Kementerian Kesehatan tersebut, Badan PPSPDM Kesehatan mendukung sasaran strategis Kementerian Kesehatan nomor 5 (lima) yaitu meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar. Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan strategis dan sasaran strategis tersebut, maka strategi yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Sasaran Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi pada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar, dengan indikator pencapaian sasaran adalah jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 167.742 orang.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- b) Pendidikan SDM Kesehatan
- c) Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi

2) Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Sasaran Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar, dengan indikator tercapainya sasaran adalah :

- a) Persentase puskesmas tanpa dokter sebesar 0%.

- b) Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 83%.
- c) Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90%.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
- b) Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
- c) Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

3) Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program Dukungan Manajemen pada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan dengan indikator pencapaian sasaran adalah nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan sebesar 80,58.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) Dukungan manajemen dan pelaksanaan program.
- b) Tata Kelola SDM.

D. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

Arah kebijakan dan strategi Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan, yaitu meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan SDM Kesehatan yang dapat menghasilkan lulusan yang berdaya saing global. Arah kebijakan tersebut dicapai melalui strategi, yaitu :

1. Strategi Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
 - a. Penyediaan bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK
 - b. Penyesuaian prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan

2. Strategi Program Dukungan Manajemen

a. Dukungan manajemen dan pelaksanaan program

Dalam rangka menjabarkan arah kebijakan dan sasaran strategis RPJMN 2020-2024, Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi Program Badan PPSPDM Kesehatan secara vertikal dan horizontal dengan tujuan menciptakan keselarasan dalam organisasi maka disusun cascading sebagai berikut :

1. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Badan PPSPDM Kesehatan mendukung Strategi Nasional Pembangunan Kesehatan pada salah satu strategi penguatan sistem kesehatan yaitu pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang difokuskan pada:
 - a. Afiriasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis termasuk pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, farmasi dan alat kesehatan);
 - b. Afiriasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati;
 - c. Afiriasi pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - d. Pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan sementara dan kontrak pelayanan;
 - e. Perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar;
 - f. Pengembangan tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar seperti promosi kesehatan dan perawat komunitas;
 - g. Penyesuaian program studi dan lembaga pendidikan bidang kesehatan dengan kebutuhan dan standar;
 - h. Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Dalam Renstra Kementerian Kesehatan, Badan PPSPDM Kesehatan mendukung salah 1 (satu) dari 8 (delapan) Sasaran Strategis pembangunan kesehatan tahun 2020-2024, yaitu: meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar yang dilakukan melalui strategi:

- a. Pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas sesuai standar;
 - b. Pemenuhan tenaga dokter spesialis di rumah sakit sesuai standar;
 - c. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait program prioritas nasional (penurunan kematian maternal, kematian bayi, stunting, pengendalian penyakit);
 - d. Afiriasi pendidikan tenaga kesehatan strategis untuk wilayah DTPK;
 - e. Pembuatan skema penempatan tenaga kesehatan untuk pemenuhan standar jumlah nakes dengan pendekatan insentif yang memadai dan perbaikan regulasi;
 - f. Meningkatkan kapasitas tenaga kader kesehatan di UKBM (posyandu, posbindu) dan memberikan reward yang memadai sesuai kinerja yang ditetapkan.
3. Pusat Pendidikan SDM Kesehatan pada RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi Program Badan PPSPDM Kesehatan mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar, dengan indikator pencapaian sasaran adalah jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 167.742 orang. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka dilakukan melalui kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan. Sasaran pada kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan adalah :
- a. Penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi lulusan SMA/ sederajat dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes tingkat akhir yang diutamakan dari daerah bermasalah kesehatan dan DTPK
 - b. Penyesuaian prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan

Indikator pencapaian sasaran kegiatan pendidikan SDM Kesehatan adalah:

- a. Jumlah penerima afiriasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK sebanyak 1.500 orang.
- b. Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM Kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan sebanyak 260 prodi dan lembaga.

Seperti dijelaskan sebelumnya pada Bab II, pada tahun 2020, berdasarkan rapat dengan Bappenas, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Badan PPSPDM

Kesehatan, terdapat pemindahan sasaran strategis dari Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi ke Kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan yaitu pada sasaran strategis Tenaga Kesehatan Lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI Yang Didayagunakan Di Fasyankes Pemerintah dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan adalah Jumlah Tenaga Kesehatan Lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI Yang Didayagunakan Di Fasyankes Pemerintah. Pada RAK Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2020-2024 ini belum memasukkan sasaran strategis tersebut karena masih menyesuaikan dengan sasaran strategis yang terdapat pada Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024.

E. Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah memiliki peran sebagai pengarah, sebagai regulator, dan sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai regulator, pemerintah melakukan penyusunan kebijakan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan pelayanan yang bermutu, sedangkan sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Regulasi bidang kesehatan dibutuhkan dalam upaya mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kesehatan yang sejalan dengan visi misi Presiden. Regulasi bidang kesehatan antara lain dalam bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan/Keputusan Presiden, Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan serta produk hukum lain bidang kesehatan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang berkeadilan sosial. Dalam rangka mendukung tercapainya Sasaran Pokok RPJMN 2020-2024 Bidang Kesehatan, dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 diperlukan dukungan regulasi. Adapun regulasi yang mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, adalah rancangan Permenkes tentang Program Afiriasi Pendidikan Kesehatan sebagai dasar pelaksanaan Program Afiriasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan Dan DTPK .

F. Kerangka Kelembagaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dipimpin oleh pejabat eselon II-a yaitu Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Pusat Pendidikan SDM Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan sumber daya manusia kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya Pusdik SDM Kesehatan menyelenggarakan empat fungsi, yaitu:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengembangan dan kemitraan, fasilitasi teknis dan penunjang penyelenggaraan, fasilitasi akreditasi, dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan;
2. Pelaksanaan di bidang fasilitasi pengembangan dan kemitraan, fasilitasi teknis dan penunjang penyelenggaraan, fasilitasi akreditasi, dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan;.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan dan kemitraan, fasilitasi teknis dan penunjang penyelenggaraan, fasilitasi akreditasi, dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan; dan
4. Pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Susunan organisasi Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

1. Subbagian Administrasi Umum; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Pusat.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Memperhatikan RPJMN 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024, Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan 2020-2024.

A. Target Kinerja Pada RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program dan kegiatan yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024. Adapun uraian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Pendidikan SDM Kesehatan pada RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Pendidikan SDM Kesehatan pada RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	INDIKATOR	TARGET					SATUAN	LOKASI
		2020	2021	2022	2023	2024		
PP : Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan								
KP : Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan								
ProP : Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan								
Penyesuaian prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan	Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan	52	104	156	208	260	Prodi dan Lembaga	Pusat dan Poltekkes Kemenkes
Penyediaan bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	Jumlah penerima afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	0	500	1000	1500	1500	Orang	Pusat dan Poltekkes Kemenkes

Berdasarkan tabel 4.1, untuk tahun 2020 Pusdik SDM Kesehatan melakukan penyiapan regulasi terkait indikator program afirmasi yang menyesuaikan indikator RPJMN yang baru terbit pada tahun 2020 sehingga pelaksanaan program baru dimulai pada tahun 2021 dengan target sebanyak 500 orang.

B. Target Kinerja Pada Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2020-2024

Pada Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2020-2024, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan mendukung pencapaian sasaran Badan PPSDM Kesehatan melalui kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan. Adapun sasaran kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya penerima afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK sebanyak 1500 orang
- b. Terlaksananya prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan sebanyak 260 prodi dan/atau institusi
- c. Tercapainya prodi dan institusi Poltekkes Kemenkes yang meningkat status akreditasinya sebanyak 132 prodi dan/atau institusi
- d. Terpenuhinya pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 6000 orang
- e. Tercapainya persentase kelulusan uji kompetensi nasional pendidikan tinggi tenaga kesehatan sebesar 80 %
- f. Tersusunnya bahan ajar terstandar nasional yang disusun sebanyak 500 bahan ajar pendidikan tenaga kesehatan

Indikator pencapaian sasaran kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan pada Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan adalah :

- a. Jumlah penerima afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK sebanyak 1500 orang
- b. Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan sebanyak 260 prodi dan/atau institusi
- c. Jumlah prodi dan institusi Poltekkes Kemenkes yang meningkat status akreditasinya sebanyak 132 prodi dan/atau institusi
- d. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 6000 orang

- e. Persentase kelulusan uji kompetensi nasional pendidikan tinggi tenaga kesehatan sebesar 80%
- f. Jumlah bahan ajar terstandar nasional yang disusun sebanyak 500 bahan ajar pendidikan tenaga kesehatan

C. Target Kinerja Pada Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024

Pusat Pendidikan SDM Kesehatan dalam melaksanakan pencapaian indikator memiliki perbedaan antara target kinerja tahun 2020 dengan target kinerja tahun 2021-2024 karena pada perencanaan dan penganggaran tahun 2021 terdapat Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang mengikuti Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

Pada tahun 2020 Pusat Pendidikan SDM Kesehatan dalam melaksanakan pencapaian indikator dilakukan melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan yaitu pada Kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan.

1. Sasaran Kebijakan teknis dan pembinaan pendidikan SDM kesehatan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan
 - a. Jumlah dokumen kebijakan teknis penyesuaian prodi sebanyak 1 dokumen
 - b. Jumlah dokumen kebijakan afirmasi bantuan biaya pendidikan dalam rangka penugasan khusus diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK sebanyak 4 kebijakan teknis
 - c. Jumlah prodi pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program sebanyak 17 prodi
 - d. Jumlah dokumen kajian pendidikan terkait implementasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan pendidikan, kompetensi lulusan pendidikan SDM kesehatan, kebutuhan kompetensi SDM kesehatan menurut jenis SDM kesehatan sebanyak 1 dokumen
 - e. Jumlah tenaga kesehatan yang belum D-III penerima bantuan biaya pendidikan Di Pusdik SDMK sebanyak 6.244 orang
 - f. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 10 Orang
 - g. Jumlah dokumen Pembinaan Wilayah Dalam Rangka Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan Akses Pelayanan Mutu Kesehatan sebanyak 1 Dokumen

- h. Monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan sebanyak 2 Dokumen
- 2. Sasaran Kebijakan teknis pendidikan dan pembinaan pendidikan di bidang fasilitasi teknis pendidikan dan penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan
 - a. Jumlah dokumen kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan sebanyak 6 Dokumen
 - b. Jumlah prodi dan institusi yang difasilitasi dalam penguatan kualitas pembelajaran sebanyak 38 Institusi
 - c. Jumlah prodi pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program sebanyak 9 Prodi
 - d. Jumlah institusi yang difasilitasi dalam penguatan kualitas penelitian sebanyak 38 Institusi
 - e. Jumlah dokumen penguatan kualitas pengabdian masyarakat sebanyak 10 pengabmas unggulan
 - f. Jumlah institusi yang difasilitasi dalam penguatan program kemahasiswaan sebanyak 38 Institusi
 - g. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 60 Orang
- 3. Sasaran Kebijakan teknis dan pembinaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan di bidang fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi akreditasi pendidikan SDM kesehatan sebanyak 1 Dokumen
 - b. Jumlah program studi dan institusi Poltekkes Kemenkes yang meningkat status akreditasinya sebanyak 20 prodi dan institusi
 - c. Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi fasilitasi pelaksanaan akreditasi Poltekkes Kemenkes sebanyak 1 Dokumen
 - d. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 1.450 Orang
 - e. Jumlah dokumen kebijakan teknis pengendalian mutu pendidikan SDM kesehatan sebanyak 9 Dokumen
 - f. Jumlah institusi yang difasilitasi dalam penguatan implementasi SPMI sebanyak 38 Institusi

4. Sasaran Terlaksananya ketatausahaan pendidikan SDM kesehatan
 - a. Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran sebanyak 9 Unit
 - b. Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 139 Unit
 - c. Jumlah dokumen rencana program dan penyusunan rencana anggaran sebanyak 2 Dokumen
 - d. Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi sebanyak 2 Dokumen
 - e. Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan perbendaharaan sebanyak 1 Dokumen
 - f. Jumlah pengelolaan kepegawaian sebanyak 68 Orang
 - g. Jumlah layanan umum, layanan rumah tangga dan perlengkapan sebanyak 1 Layanan
 - h. Jumlah realisasi anggaran operasional dan pemeliharaan kantor sebesar 90 Persen

Sedangkan pada tahun 2021-2024 Pusat Pendidikan SDM Kesehatan dalam melaksanakan pencapaian indikator dilakukan melalui 2 (dua) program yaitu :

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
2. Program Dukungan Manajemen

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

a. Kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan

Kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan terdiri dari beberapa klasifikasi rincian output yaitu: (1) Bantuan Pendidikan Tinggi; (2) Pendidikan Tinggi; (3) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga; (4) Kebijakan Bidang Kesehatan; (5) Standarisasi Produk; (6) Kerjasama; (7) Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria; (8) Pelatihan Bidang Pendidikan; (9) Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah; dan (10) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat.

Untuk mencapai sasaran klasifikasi rincian output pada kegiatan pendidikan SDM kesehatan, maka diuraikan Indikator sebagai berikut :

1) Bantuan Pendidikan Tinggi;

Sasaran bantuan pendidikan tinggi adalah terlaksananya pemberian bantuan pendidikan tinggi, melalui kegiatan :

a) Afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK, dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :

- (1) Jumlah dokumen penyiapan kerjasama dan kemitraan program afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK yang disusun sebanyak 20 dokumen.
- (2) Jumlah dokumen penyiapan rekrutmen dan pengelolaan program afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK yang disusun sebanyak 4 dokumen.
- (3) Jumlah peserta penerima bantuan biaya pendidikan tinggi yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK sebanyak 1500 orang.
- (4) Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK yang disusun sebanyak 4 laporan.

2) Pendidikan Tinggi

Sasaran pendidikan tinggi adalah terlaksananya kegiatan pendidikan tinggi, melalui kegiatan :

a) Tenaga Kesehatan Lulusan Poltekkes Kemenkes Yang Didayagunakan Di Fasyankes Pemerintah, dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :

- (1) Jumlah tenaga kesehatan lulusan poltekkes kemenkes yang didayagunakan di fasyankes pemerintah sebanyak 4500 Orang.

b) Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Berprestasi, dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :

- (1) Jumlah mahasiswa berprestasi Poltekkes Kemenkes tingkat nasional sebanyak 152 orang

3) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga;

Sasaran fasilitasi dan pembinaan lembaga adalah terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan lembaga, melalui kegiatan

a) Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :

- (1) Jumlah dokumen kajian kebutuhan pendidikan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan yang disusun sebanyak 4 dokumen
- (2) Jumlah dokumen peta jalan pengembangan pendidikan tenaga kesehatan yang disusun sebanyak 1 dokumen
- (3) Jumlah program studi pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan sebanyak 123 lembaga
- (4) Jumlah institusi Poltekkes Kemenkes yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan sebanyak 38 lembaga
- (5) Jumlah program studi rintisan kelas internasional di Poltekkes Kemenkes sebanyak 40 lembaga
- (6) Jumlah Center of Excellent (CoE) Poltekkes Kemenkes sebanyak 20 lembaga

b) Prodi dan institusi Poltekkes Kemenkes yang meningkat status akreditasinya dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :

- (1) Jumlah Poltekkes Kemenkes Mendapatkan Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebanyak 38 lembaga
- (2) Jumlah Poltekkes Kemenkes Yang Mendapatkan Pembinaan Audit Mutu Internal (AMI) sebanyak 38 lembaga
- (3) Jumlah lembaga yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan akreditasi Prodi dan/atau Institusi Poltekkes Kemenkes dan meningkat status akreditasinya sebanyak 132 lembaga
- (4) Jumlah Prodi dan/atau Institusi Poltekkes Kemenkes yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam persiapan akreditasi internasional sebanyak 24 lembaga

- (5) Jumlah Poltekkes Kemenkes Yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Dalam Rangka Sinkronisasi Data Prodi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan Dengan PD Dikti sebanyak 38 lembaga
 - (6) Jumlah Poltekkes Kemenkes yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan tracer study sebanyak 38 lembaga
 - (7) Jumlah Poltekkes Kemenkes yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan akreditasi perpustakaan, sebanyak 38 lembaga
 - (8) Jumlah Poltekkes Kemenkes yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan akreditasi laboratorium, sebanyak 38 lembaga
 - (9) Jumlah laporan evaluasi pemenuhan standar laboratorium di Poltekkes Kemenkes, sebanyak 4 laporan
 - (10) Jumlah laporan evaluasi penyelenggaraan akreditasi sebagai upaya untuk pencapaian akreditasi unggul, sebanyak 4 laporan
 - (11) Terlaksananya kegiatan Pertemuan Koordinasi Nasional Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan sebanyak 1 kegiatan per tahun
- c) Poltekkes Kemenkes yang mengimplementasikan pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti, dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :
- (1) Jumlah lembaga (Poltekkes Kemekes) yang memanfaatkan pembelajaran daring sebanyak 38 lembaga.
 - (2) Jumlah lembaga yang mendapatkan bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan sebanyak 38 lembaga
 - (3) Jumlah Lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang datanya terintegrasi pada DASHBOARD SIAKAD sebanyak 38 lembaga
 - (4) Jumlah lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang mendapatkan akses referensi elektronik, sebanyak 38 lembaga
- d) Poltekkes Kemenkes yang meningkat kinerja publikasi, penelitian dan pengabmasnya, dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :
- (1) Jumlah lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang mendapatkan bimbingan teknis penelitian dan publikasi sebanyak 38 lembaga

- (2) Jumlah proposal penelitian yang lolos seleksi penelitian penugasan Poltekkes Kemenkes sebanyak 40 dokumen
- (3) Jumlah proposal penerima insentif luaran hasil penelitian Poltekkes Kemenkes sebanyak 80 dokumen
- (4) Jumlah lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang mendapatkan bimbingan teknis pengabdian masyarakat sebanyak 38 lembaga.
- (5) Jumlah proposal pengabdian masyarakat yang lolos seleksi pengabdian masyarakat penugasan Poltekkes Kemenkes sebanyak 40 dokumen
- (6) Jumlah Lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang mendapatkan penguatan konsep pembinaan wilayah sebanyak 38 lembaga
- (7) Jumlah lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang mendapatkan akses aplikasi pemeriksaan plagiasi karya ilmiah, sebanyak 38 lembaga
- (8) Jumlah lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang berpartisipasi dalam kegiatan Edu Health Fair, sebanyak 38 lembaga

e) Penerimaan mahasiswa baru bersama Poltekkes Kemenkes, dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :

- (1) Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes sebanyak 38 lembaga
- (2) Jumlah laporan monitoring dan evaluasi seleksi penerimaan mahasiswa baru bersama Poltekkes Kemenkes, sebanyak 5 laporan.

f) Klasterisasi Poltekkes Kemenkes, dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :

- (1) Jumlah lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang mendapatkan penilaian dalam klasterisasi poltekkes kemenkes, sebanyak 38 lembaga

4) Kebijakan Bidang Kesehatan;

Sasaran kebijakan bidang kesehatan adalah tersusunnya rekomendasi kebijakan bidang kesehatan, melalui kegiatan :

a) Kebijakan pendidikan tinggi bidang kesehatan, dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut:

- (1) Jumlah rekomendasi kebijakan pendidikan tinggi bidang kesehatan yang disusun sebanyak 8 dokumen

5) Standarisasi Produk;

Sasaran standarisasi produk adalah tersusunnya produk yang terstandar, melalui kegiatan:

a) Bahan ajar pendidikan tinggi bidang kesehatan terstandar nasional dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :

- (1) Jumlah bahan ajar pendidikan tinggi bidang kesehatan terstandar nasional yang disusun sebanyak 500 bahan ajar

b) Soal Uji Kompetensi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan, dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :

- (1) Jumlah orang yang mengikuti workshop item development sebanyak 280 orang
- (2) Jumlah orang yang mengikuti workshop item review sebanyak 280 orang
- (3) Jumlah kelompok soal uji kompetensi pendidikan tinggi tenaga kesehatan (Berdasarkan Jenis Pendidikan) yang disusun sebanyak 36 kelompok soal
- (4) Jumlah lembaga yang mengikuti try out uji kompetensi nasional pendidikan tinggi tenaga kesehatan sebanyak 38 lembaga
- (5) Jumlah laporan monitoring dan evaluasi uji kompetensi nasional pendidikan tinggi tenaga kesehatan sebanyak 4 laporan

6) Kerjasama

a) Kerjasama dan Kemitraan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan, dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :

- (1) Jumlah dokumen kerjasama dan kemitraan pendidikan tinggi bidang kesehatan, sebanyak 72 dokumen
- (2) Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kerjasama pendidikan tenaga kesehatan sebanyak 4 laporan

7) Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK);

Sasaran NSPK adalah tersusunnya NSPK, melalui kegiatan :

a) NSPK pendidikan tinggi bidang kesehatan dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :

- (1) Jumlah kurikulum inti pendidikan tinggi bidang kesehatan yang disusun sebanyak 20 kurikulum
- (2) Jumlah standar sarana dan prasarana pembelajaran yang disusun sebanyak 4 standar
- (3) Jumlah petunjuk teknis/pedoman pendidikan tinggi bidang kesehatan yang disusun sebanyak 20 juknis/pedoman
- (4) Jumlah Statuta Poltekkes Kemenkes yang disusun sebanyak 38 Statuta

8) Pelatihan Bidang Pendidikan;

Sasaran pelatihan bidang pendidikan adalah terlaksananya pelatihan bidang pendidikan, melalui kegiatan :

a) Dosen dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :

- (1) Jumlah kurikulum dan modul peningkatan kapasitas yang disusun sebanyak 8 dokumen
- (2) Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan, workshop dan short course sebanyak 6000 orang
- (3) Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti program magang sebanyak 240 orang
- (4) Jumlah dosen berprestasi yang mendapatkan pelatihan pada pemilihan dosen berprestasi sebanyak 40 orang.

9) Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah

Sasaran fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah adalah terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah, melalui kegiatan :

a) Fasilitasi dan pembinaan wilayah, dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :

- (1) Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan wilayah sebanyak 1 pemerintah daerah setiap tahun

10) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat

Sasaran fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat adalah terlaksananya pengabdian masyarakat unggulan Poltekkes Kemenkes, melalui kegiatan :

- a) Pengabdian Masyarakat Unggulan Poltekkes Kemenkes dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Jumlah pengabdian masyarakat unggulan Poltekkes Kemenkes sebanyak 40 pengabmas unggulan

2. Program Dukungan Manajemen

- a) Kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja, kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Pusat Pendidikan SDM Kesehatan terdiri dari beberapa klasifikasi rincian output yaitu: (1) Layanan Perkantoran; (2) Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal; (3) Layanan Umum; (4) Layanan Sarana Internal; (5) Layanan SDM; (6) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal; (7). Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal;

Untuk mencapai sasaran klasifikasi rincian output pada kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, maka diuraikan Indikator sebagai berikut :

1) Layanan Perkantoran

Sasaran layanan perkantoran adalah terlaksananya layanan perkantoran Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, melalui kegiatan

operasional dan pemeliharaan kantor dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan adalah persentase realisasi anggaran operasional dan pemeliharaan kantor sebanyak 95%.

2) Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal;

Sasaran layanan perencanaan dan penganggaran internal adalah terlaksananya layanan perencanaan dan penganggaran internal Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, melalui kegiatan Rencana Program dan Anggaran Pusat Pendidikan SDM Kesehatan dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran Pusat Pendidikan SDM Kesehatan yang disusun sebanyak 8 dokumen.

3) Layanan Umum;

Sasaran layanan umum adalah terlaksananya layanan umum Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, melalui kegiatan penatalaksanaan pelayanan umum, rumah tangga dan perlengkapan dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan adalah jumlah layanan umum, rumah tangga dan perlengkapan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan sebanyak 1 layanan

4) Layanan Sarana Internal;

Sasaran layanan sarana internal adalah terlaksananya layanan sarana internal Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, melalui kegiatan :

- (1) Perangkat pengolah data dan komunikasi Pusat Pendidikan SDM Kesehatan dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan adalah jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Pusat Pendidikan SDM Kesehatan sebanyak 434 unit.
- (2) Peralatan dan fasilitas perkantoran Pusat Pendidikan SDM Kesehatan dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan adalah jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran Pusat Pendidikan SDM Kesehatan sebanyak 49 unit.

5) Layanan SDM;

Sasaran layanan SDM adalah terlaksananya layanan SDM Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, melalui kegiatan tatalaksana kepegawaian Pusat Pendidikan SDM Kesehatan dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan adalah jumlah pegawai Pusat Pendidikan SDM Kesehatan yang mendapatkan layanan kepegawaian sebanyak 72 orang

6) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal;

Sasaran layanan monitoring dan evaluasi internal adalah terlaksananya layanan monitoring dan evaluasi internal Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, melalui kegiatan :

- (1) Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan adalah jumlah laporan kinerja Pusat Pendidikan SDM Kesehatan yang disusun sebanyak 8 laporan
- (2) Penyusunan laporan keuangan dan BMN dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan adalah jumlah laporan keuangan dan BMN Pusat Pendidikan SDM Kesehatan yang disusun sebanyak 4 laporan

7) Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal

Sasaran layanan pendidikan dan pelatihan internal adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan internal Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, melalui kegiatan pengembangan kapasitas pegawai Pusat Pendidikan SDM Kesehatan dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan adalah jumlah pegawai yang mendapatkan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan dan workshop sebanyak 240 orang

D. Kerangka Pendanaan

Dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan dibutuhkan pembiayaan yang dijamin kecukupan dalam penyediaannya, benar dalam pengalokasiannya serta efektif dan efisien dalam pembelanjanya. Pembiayaan ini harus tersedia secara berkesinambungan sesuai dengan pentahapannya selama

periode Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tahun 2020-2024.

Kerangka pendanaan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan bersumber pada pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang merupakan suplemen terhadap APBN yang dapat disediakan. Pada tahun 2020 sumber pembiayaan APBN Pusat Pendidikan SDM Kesehatan terdapat pada fungsi kesehatan, namun pada tahun 2021 dengan adanya Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran maka terdapat pergeseran fungsi anggaran yaitu:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi pada fungsi pendidikan
2. Program Dukungan Manajemen pada fungsi kesehatan

BAB V

PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

Pemantauan dan penilaian merupakan suatu proses pengamatan terhadap penyelenggaraan/pelaksanaan suatu rencana, dalam hal ini Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tahun 2020-2024, dan bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan serta kebijakan yang telah ditetapkan.

A. Pemantauan

Pemantauan terhadap rencana kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tahun 2020-2024 ditujukan untuk mengetahui kemajuan kegiatan pendidikan SDM kesehatan, yang dilakukan secara berkesinambungan selama kurun waktu 2020-2024. Dengan demikian pemantauan ditekankan pada input dan proses pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan.

Pemantauan dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi obyek yang menjadi sasaran pemantauan dan secara tidak langsung dengan cara analisis atas laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan SDM kesehatan. Pemantauan dilakukan setiap bulan dan triwulan, sejalan dengan pelaporan yang dilakukan pada e-monev DJA dan e-monev Bappenas.

B. Penilaian

Penilaian Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tahun 2020-2024 ditujukan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pendidikan SDM kesehatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran selama kurun waktu 2020-2024 yang telah ditetapkan, serta dilakukan sebagai berikut :

1. Penilaian tahunan dalam kerangka penilaian kinerja Pusat Pendidikan SDM Kesehatan yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Tahunan.
2. Penilaian tengah periode (*Midterm Evaluation*) yang dilakukan pada tahun 2022.
3. Penilaian akhir (*Endterm Evaluation*) yang dilakukan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025.

Penilaian Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tahun 2020-2024 dilakukan dengan menilai pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan baik sasaran strategis maupun sasaran dari masing-masing kegiatan pelaksanaan dan rincian kegiatan, seperti tercantum dalam Bab III Kelembagaan, Kegiatan Pokok, Target Kinerja, dan Kerangka Pendanaan.

Khusus untuk penilaian tahunan, disamping dilakukan penilaian terhadap sasaran strategis dan sasaran kegiatan pelaksanaan, juga dilakukan penilaian terhadap realisasi anggaran.

Agar penilaian Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tahun 2020-2024 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka perlu dilakukan penguatan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendidikan SDM Kesehatan.

Semua hasil penilaian kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan tahun 2020-2024, baik penilaian tahunan, penilaian tengah periode dan penilaian akhir periode didokumentasikan dalam bentuk laporan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Pusdik SDM Kesehatan tahun 2020-2024 disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program dan kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Bidang/Sub Bagian di lingkungan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua pemangku kepentingan, oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

**CASCADING INDIKATOR RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENDIDIKAN KESEHATAN DENGAN RENCANA AKSI PROGRAM
BADAN PPSDM KESEHATAN DAN RENCANA STRATEGIS KEMENKES TAHUN 2020-2024**



LAMPIRAN 2
MATRIK TARGET KINERJA RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENDIDIKAN
KESEHATAN TAHUN 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
A.	Kebijakan teknis dan pembinaan pendidikan SDM kesehatan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan	Jumlah dokumen kebijakan teknis penyesuaian prodi	1	dokumen
		Jumlah dokumen kebijakan afirmasi bantuan biaya pendidikan dalam rangka penugasan khusus diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	4	kebijakan teknis
		Jumlah prodi pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program	17	prodi
		Jumlah dokumen kajian pendidikan terkait implementasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan pendidikan, kompetensi lulusan pendidikan SDM kesehatan, kebutuhan kompetensi SDM kesehatan menurut jenis SDM kesehatan	1	dokumen
		Jumlah tenaga kesehatan yang belum D-III penerima bantuan biaya pendidikan : • Di Pusdik SDMK : 1.391 orang • Di Poltekkes Kemenkes (realokasi) : 4.833 orang	6.224	orang
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	10	Orang
		Jumlah dokumen Pembinaan Wilayah Dalam Rangka Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan Akses Pelayanan Mutu Kesehatan	1	Dokumen
		Monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan	2	Dokumen
B.	Kebijakan teknis pendidikan dan pembinaan pendidikan di bidang fasilitasi teknis pendidikan dan penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber	Jumlah dokumen kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan	6	Dokumen
		Jumlah prodi dan institusi yang difasilitasi dalam penguatan kualitas pembelajaran	38	Institusi
		Jumlah prodi pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program	9	Prodi

	daya manusia kesehatan	Jumlah institusi yang difasilitasi dalam penguatan kualitas penelitian	38	Institusi
		Jumlah dokumen penguatan kualitas pengabdian masyarakat	10	pengabmas unggulan
		Jumlah institusi yang difasilitasi dalam penguatan program kemahasiswaan	38	Institusi
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	60	Orang
C.	Kebijakan teknis dan pembinaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan di bidang fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan	Penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi akreditasi pendidikan SDM kesehatan	1	Dokumen
		Jumlah program studi dan institusi Poltekkes Kemenkes yang meningkat status akreditasinya	20	prodi dan institusi
		Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi fasilitasi pelaksanaan akreditasi Poltekkes Kemenkes	1	Dokumen
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	1.450	Orang
		Jumlah dokumen kebijakan teknis pengendalian mutu pendidikan SDM kesehatan	9	Dokumen
		Jumlah institusi yang difasilitasi dalam penguatan implementasi SPMI	38	Institusi
D.	Terlaksananya ketatausahaan pendidikan SDM kesehatan	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	9	Unit
		Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	139	Unit
		Jumlah dokumen rencana program dan penyusunan rencana anggaran	2	Dokumen
		Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi	2	Dokumen
		Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	1	Dokumen
		Jumlah pengelolaan kepegawaian	68	Orang
		Jumlah layanan umum, layanan rumah tangga dan perlengkapan	1	Layanan
		Jumlah realisasi anggaran operasional dan pemeliharaan kantor	90	Persen

LAMPIRAN 3

MATRIK TARGET KINERJA RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENDIDIKAN KESEHATAN TAHUN 2021-2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					Satuan
						2020	2021	2022	2023	2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
A	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi										
A.1	Kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan	Jumlah penerima afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK				0	500	1000	1500	1500	Orang
		Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM Kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan				52	104	156	208	260	Prodi dan Lembaga
A.1.a	Bantuan Pendidikan Tinggi										
		Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK									
				Penyiapan Kerjasama dan Kemitraan Program Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	Jumlah dokumen penyiapan kerjasama dan kemitraan program afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK yang disusun	-	5	5	5	5	Dokumen
				Penyiapan Rekrutmen dan Pengelolaan Program Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	Jumlah dokumen penyiapan rekrutmen dan pengelolaan program afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK yang disusun	-	1	1	1	1	Dokumen

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					Satuan
						2020	2021	2022	2023	2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
				Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan Pada Program Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	Jumlah peserta penerima bantuan biaya pendidikan tinggi yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	-	500	1000	1500	1500	Orang
				Monitoring dan Evaluasi Program Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK yang disusun	-	1	1	1	1	Laporan
A.1.b	Pendidikan Tinggi										
			Tenaga Kesehatan Lulusan Poltekkes Kemenkes Yang Didayagunakan di Fasyankes Pemerintah								
				Tenaga Kesehatan Lulusan Poltekkes Yang Didayagunakan Oleh Fasyankes Pemerintah	Jumlah tenaga kesehatan lulusan poltekkes kemenkes yang didayagunakan di fasyankes pemerintah	-	500	1000	1500	1500	Orang
			Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Berprestasi								
				Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Poltekkes Kemenkes Tingkat Nasional	Jumlah mahasiswa berprestasi Poltekkes Kemenkes tingkat nasional	-	38	38	38	38	Orang
A.1.c	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga										
			Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan								

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					Satuan
						2020	2021	2022	2023	2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
				Penyusunan Kajian Kebutuhan Pendidikan Sesuai Kebutuhan Pelayanan Kesehatan	Jumlah dokumen kajian kebutuhan pendidikan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan yang disusun	-	1	1	1	1	Dokumen
				Penyusunan Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen peta jalan pengembangan pendidikan tenaga kesehatan yang disusun	-	1	-	-	-	Dokumen
				Fasilitasi Penyesuaian Program Studi Pendidikan SDM Kesehatan	Jumlah program studi pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan	-	7	7	7	7	Lembaga
				Fasilitasi Penyesuaian Kelembagaan Institusi Poltekkes Kemenkes	Jumlah institusi Poltekkes Kemenkes yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan	-	10	10	10	8	Lembaga
				Fasilitasi Pelaksanaan Rintisan Kelas Internasional di Poltekkes Kemenkes	Jumlah program studi rintisan kelas internasional di Poltekkes Kemenkes	-	6	6	6	6	Lembaga
				Pengembangan Center of Excellent (CoE) Poltekkes Kemenkes	Jumlah Center of Excellent (CoE) Poltekkes Kemenkes	-	5	5	5	5	Lembaga
			Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes Yang Meningkatkan Status Akreditasinya								
				Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Kemenkes	Jumlah Poltekkes Kemenkes Mendapatkan Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	-	38	38	38	38	Lembaga
				Pembinaan Audit Mutu Internal (AMI) Poltekkes Kemenkes	Jumlah Poltekkes Kemenkes Yang Mendapatkan Pembinaan Audit Mutu Internal (AMI)	-	38	38	38	38	Lembaga
				Pendampingan dan Pembinaan Akreditasi Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes	Jumlah lembaga yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan akreditasi Prodi dan/atau Institusi Poltekkes	-	48	76	104	132 (k)	Lembaga

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					Satuan
						2020	2021	2022	2023	2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
					Kemenkes dan meningkat status akreditasinya						
				Workshop Persiapan Akreditasi Internasional	Jumlah Prodi dan/atau Institusi Poltekkes Kemenkes yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam persiapan akreditasi internasional	-	6	6	6	6	Lembaga
				Sinkronisasi Data Prodi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan Dengan PD Dikti	Jumlah Poltekkes Kemenkes Yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Dalam Rangka Sinkronisasi Data Prodi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan Dengan PD Dikti	-	38	38	38	38	Lembaga
				Sinkronisasi Data Tracer Study Poltekkes Kemenkes	Jumlah Poltekkes Kemenkes yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan tracer study	-	38	38	38	38	Lembaga
				Pembinaan Akreditasi Perpustakaan Poltekkes Kemenkes	Jumlah Poltekkes Kemenkes yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan akreditasi perpustakaan	-	38	38	38	38	Lembaga
				Pembinaan Akreditasi Laboratorium di Poltekkes Kemenkes	Jumlah Poltekkes Kemenkes yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan akreditasi laboratorium	-	38	38	38	38	Lembaga
				Evaluasi Pemenuhan Standar Laboratorium di Poltekkes Kemenkes	Jumlah laporan evaluasi pemenuhan standar laboratorium di Poltekkes Kemenkes	-	1	1	1	1	Laporan
				Evaluasi Penyelenggaraan Akreditasi Sebagai Upaya Untuk Pencapaian Akreditasi Unggul	Jumlah laporan evaluasi penyelenggaraan akreditasi sebagai upaya untuk pencapaian akreditasi unggul	-	1	1	1	1	Laporan
				Pertemuan Koordinasi Nasional Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pertemuan Koordinasi Nasional Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	-	1	1	1	1	Kegiatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					Satuan
						2020	2021	2022	2023	2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Poltekkes Kemenkes Yang Mengimplementasikan Pembelajaran sesuai Dengan SN-DIKTI								
				Pengembangan pembelajaran Daring di Poltekkes Kemenkes	Jumlah lembaga (Poltekkes Kemakes) yang memanfaatkan pembelajaran daring	-	38	38	38	38	Lembaga
				Bimbingan Teknis Pembelajaran Pada Prodi PT Kesda	Jumlah lembaga eks PTEKESDA yang mendapatkan bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan	-	38	38	38	38	Lembaga
				Integrasi Sistem Informasi Akademik Poltekkes Kemenkes Terpadu (SIKAD ENTERPRISES)	Jumlah Lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang datanya terintegrasi pada DASHBOARD SIKAD	-	38	38	38	38	Lembaga
				Langganan Referensi Elektronik Bagi Poltekkes Kemenkes	Jumlah lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang mendapatkan akses referensi elektronik	-	38	38	38	38	Lembaga
			Poltekkes Kemenkes Yang Meningkat Kinerja Publikasi, Penelitian dan Pengabmasnya								
				Bimbingan Teknis Penelitian dan Publikasi Ilmiah Poltekkes Kemenkes	Jumlah lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang mendapatkan bimbingan teknis penelitian dan publikasi	-	38	38	38	38	Lembaga
				Seleksi Penelitian Penugasan Poltekkes Kemenkes	Jumlah proposal penelitian yang lolos seleksi penelitian penugasan Poltekkes Kemenkes	-	10	10	10	10	Dokumen
				Insentif Luaran Hasil Penelitian Poltekkes Kemenkes	Jumlah proposal penerima insentif luaran hasil penelitian Poltekkes Kemenkes	-	20	20	20	20	Dokumen
				Bimbingan Teknis Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset Poltekkes Kemenkes	Jumlah lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang mendapatkan bimbingan teknis pengabdian masyarakat	-	38	38	38	38	Lembaga

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					Satuan
						2020	2021	2022	2023	2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
				Seleksi Pengabdian Masyarakat Unggulan Poltekkes Kemenkes	Jumlah proposal pengabdian masyarakat yang lolos seleksi pengabdian masyarakat penugasan Poltekkes Kemenkes	-	10	10	10	10	Dokumen
				Penguatan Konsep Pembinaan Wilayah Poltekkes Kemenkes (Desa Binaan)	Jumlah Lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang mendapatkan penguatan konsep pembinaan wilayah	-	38	38	38	38	Lembaga
				Edu Health Fair	Jumlah lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang berpartisipasi dalam kegiatan Edu Health Fair	-	38	38	38	38	Lembaga
			Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama Poltekkes Kemenkes								
				Manajemen Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama Poltekkes Kemenkes	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes	-	38	38	38	38	Lembaga
				Monitoring dan Evaluasi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama Poltekkes Kemenkes	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi seleksi penerimaan mahasiswa baru bersama Poltekkes Kemenkes	-	1	1	1	1	Laporan
			Klasterisasi Poltekkes Kemenkes								
				Klasterisasi Poltekkes Kemenkes	Jumlah lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang mendapatkan penilaian dalam klasterisasi poltekkes kemenkes	-	38	38	38	38	Lembaga
A.1.d	Kebijakan Bidang Kesehatan										
			Kebijakan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan								
				Kebijakan pendidikan tinggi bidang kesehatan	Jumlah rekomendasi kebijakan pendidikan tinggi bidang kesehatan yang disusun	-	3	3	1	1	Dokumen
A.1.e	Standarisasi Produk										

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					Satuan
						2020	2021	2022	2023	2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Bahan Ajar Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan Terstandar Nasional								
				Penyusunan Bahan Ajar Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan Terstandar Nasional	Jumlah bahan ajar pendidikan tinggi bidang kesehatan terstandar nasional yang disusun	-	50	150	300	500 K)	Bahan Ajar
			Soal Uji Kompetensi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan								
				Workshop Item Development	Jumlah orang yang mengikuti workshop item development	-	70	70	70	70	Orang
				Workshop Item Review	Jumlah orang yang mengikuti workshop item review	-	70	70	70	70	Orang
				Penyusunan Soal Uji Kompetensi Nasional Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	Jumlah kelompok soal uji kompetensi pendidikan tinggi tenaga kesehatan (Berdasarkan Jenis Pendidikan) yang disusun	-	36	36	36	36	Kelompok Soal
				Pelaksanaan Try Out Uji Kompetensi Nasional Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan	Jumlah lembaga yang mengikuti try out uji kompetensi nasional pendidikan tinggi tenaga kesehatan	-	38	38	38	38	Lembaga
				Monitoring dan Evaluasi Uji Kompetensi Nasional Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi uji kompetensi nasional pendidikan tinggi tenaga kesehatan	-	1	1	1	1	Laporan
A.1.f	Kerjasama										
			Kerjasama dan Kemitraan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan								
				Kerjasama dan kemitraan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	Jumlah Kerjasama dan Kemitraan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	-	6	6	6	6	Dokumen

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					Satuan
						2020	2021	2022	2023	2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
				Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pendidikan Tenaga Kesehatan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kerjasama pendidikan tenaga kesehatan	-	1	1	1	1	Laporan
A.1.g	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										
			NSPK Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan								
				Penyiapan Bahan Kurikulum Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	Jumlah kurikulum pendidikan tinggi bidang kesehatan yang disusun/direviu	-	5	5	5	5	Kurikulum
				Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Jumlah standar sarana dan prasarana pembelajaran yang disusun	-	1	1	1	1	Standar
				Penyusunan Petunjuk Teknis/Pedoman Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	Jumlah petunjuk teknis/pedoman pendidikan tinggi bidang kesehatan yang disusun	-	2	6	6	6	Juknis/ Pedoman
				Pendampingan Penyusunan Statuta Poltekkes Kemenkes	Jumlah Statuta Poltekkes Kemenkes yang disusun	-	38	-	-	-	Statuta
A.1.h	Pelatihan Bidang Pendidikan										
			Dosen dan Tenaga Kependidikan Yang Ditingkatkan Kompetensinya								
				Penyusunan Kurikulum dan Modul Peningkatan Kapasitas	Jumlah kurikulum dan modul peningkatan kapasitas yang disusun	-	2	2	2	2	Dokumen
				Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan Melalui Pelatihan, Workshop dan Short Course	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan, workshop dan short course	-	1800	3200	4600	6000K)	Orang
				Pemagangan Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti program magang	-	60	60	60	60	Orang

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					Satuan
						2020	2021	2022	2023	2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
				Penilaian dan Pelaksanaan Dosen Berprestasi	Jumlah dosen berprestasi yang mendapatkan pelatihan pada pemilihan dosen berprestasi	-	10	10	10	10	Orang
A.1.i	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah										
			Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah								
				Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah Provinsi Papua	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan wilayah	-	1	1	1	1	Pemerintah Daerah
A.1.j	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat										
			Pengabdian Masyarakat Unggulan Poltekkes Kemenkes								
				Pengabdian Masyarakat Unggulan Poltekkes Kemenkes	Jumlah pengabdian masyarakat unggulan Poltekkes Kemenkes	-	10	10	10	10	Kelompok Masyarakat
A.1.k	Penelitian		Penelitian Penugasan Poltekkes Kemenkes								
				Penelitian Penugasan Poltekkes Kemenkes	Jumlah pembiayaan penelitian penugasan Poltekkes Kemenkes	-	-	10	10	10	Penelitian
B	Program Dukungan Manajemen										
B.1	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan										
B.1.a	Layanan Perkantoran										
			Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pusat Pendidikan SDM Kesehatan								

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					Satuan
						2020	2021	2022	2023	2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
				Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Persentase realisasi anggaran operasional dan pemeliharaan kantor	-	95	95	95	95	%
B.1.b	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal										
			Rencana Program dan Anggaran Pusat Pendidikan SDM Kesehatan								
				Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran Pusat Pendidikan SDM Kesehatan yang disusun	-	2	2	2	2	Dokumen
B.1.c	Layanan Umum										
			Layanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan								
				Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan	Jumlah layanan umum, rumah tangga dan perlengkapan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	-	1	1	1	1	Layanan
B.1.d	Layanan Sarana Internal										
			Layanan Sarana Internal Pusat Pendidikan SDM								
				Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	-	145	50	50	50	Unit
				Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	-	10	10	10	10	Unit
B.1.e	Layanan SDM										

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					Satuan
						2020	2021	2022	2023	2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Layanan Kepegawaian Pusat Pendidikan SDM Kesehatan								
				Pengelolaan Kepegawaian	Jumlah pegawai Pusat Pendidikan SDM Kesehatan yang mendapatkan layanan kepegawaian	-	72	72	72	72	Orang
B.1.f	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal										
			Layanan Monev dan Pengelolaan Keuangan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan								
				Monitoring dan Evaluasi Internal	Jumlah laporan kinerja Pusat Pendidikan SDM Kesehatan yang disusun	-	2	2	2	2	Laporan
				Penyusunan Laporan Keuangan dan Perbendaharaan	Jumlah laporan keuangan dan BMN Pusat Pendidikan SDM Kesehatan yang disusun	-	1	1	1	1	Laporan
B.1.g	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal										
			Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal Pegawai Pusat Pendidikan SDM Kesehatan								
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	Jumlah pegawai yang mendapatkan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan dan workshop	-	60	60	60	60	Orang

LAMPIRAN 4

MATRIK KERANGKA PENDANAAN RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENDIDIKAN KESEHATAN TAHUN 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran
A.	Kebijakan teknis dan pembinaan pendidikan SDM kesehatan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan	Jumlah dokumen kebijakan teknis penyesuaian prodi	Rp. 7.829.949.000,-
		Jumlah dokumen kebijakan afirmasi bantuan biaya pendidikan dalam rangka penugasan khusus diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	
		Jumlah prodi pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program	
		Jumlah dokumen kajian pendidikan terkait implementasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan pendidikan, kompetensi lulusan pendidikan SDM kesehatan, kebutuhan kompetensi SDM kesehatan menurut jenis SDM kesehatan	
		Jumlah tenaga kesehatan yang belum D-III penerima bantuan biaya pendidikan : • Di Pusdik SDMK : 1.391 orang • Di Poltekkes Kemenkes (realokasi) : 4.833 orang	
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	
		Jumlah dokumen Pembinaan Wilayah Dalam Rangka Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan Akses Pelayanan Mutu Kesehatan	
		Monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan	
B.	Kebijakan teknis pendidikan dan pembinaan pendidikan di bidang fasilitasi teknis pendidikan dan penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber	Jumlah dokumen kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan	Rp. 4.482.038.000,-
		Jumlah prodi dan institusi yang difasilitasi dalam penguatan kualitas pembelajaran	
		Jumlah prodi pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program	
		Jumlah institusi yang difasilitasi dalam penguatan kualitas penelitian	

	daya manusia kesehatan	Jumlah dokumen penguatan kualitas pengabdian masyarakat	
		Jumlah institusi yang difasilitasi dalam penguatan program kemahasiswaan	
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	
C.	Kebijakan teknis dan pembinaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan di bidang fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan	Penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi akreditasi pendidikan SDM kesehatan	Rp. 4.323.016.000,-
		Jumlah program studi dan institusi Poltekkes Kemenkes yang meningkat status akreditasinya	
		Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi fasilitasi pelaksanaan akreditasi Poltekkes Kemenkes	
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	
		Jumlah dokumen kebijakan teknis pengendalian mutu pendidikan SDM kesehatan	
		Jumlah institusi yang difasilitasi dalam penguatan implementasi SPMI	
D.	Terlaksananya ketatausahaan pendidikan SDM kesehatan	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Rp. 3.595.768.000,-
		Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	
		Jumlah dokumen rencana program dan penyusunan rencana anggaran	
		Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi	
		Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	
		Jumlah pengelolaan kepegawaian	
		Jumlah layanan umum, layanan rumah tangga dan perlengkapan	
		Jumlah realisasi anggaran operasional dan pemeliharaan kantor	
TOTAL			Rp. 20.230.771.000,-

LAMPIRAN 5

MATRIK KERANGKA PENDANAAN RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENDIDIKAN KESEHATAN TAHUN 2021-2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11
A	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				-	77.532	93.741	109.557	113.085
A.1	Kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan				-	77.532	93.741	109.557	113.085
A.1.a	Bantuan Pendidikan Tinggi								
		Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK							
			Penyiapan Kerjasama dan Kemitraan Program Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	Jumlah dokumen penyiapan kerjasama dan kemitraan program afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK yang disusun	-	1.403	1.473	1.547	1.624
			Penyiapan Rekrutmen dan Pengelolaan Program Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	Jumlah dokumen penyiapan rekrutmen dan pengelolaan program afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK yang disusun	-	998	1.048	1.100	1.155
			Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan Pada Program Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	Jumlah peserta penerima bantuan biaya pendidikan tinggi yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	-	12.455	24.910	37.365	37.365
			Monitoring dan Evaluasi Program Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK yang disusun	-	807	847	890	934
A.1.b	Pendidikan Tinggi								

NO	PROGRAM/KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11
		Tenaga Kesehatan Lulusan Poltekkes Kemenkes Yang Didayagunakan di Fasyankes Pemerintah							
			Tenaga Kesehatan Lulusan Poltekkes Yang Didayagunakan Oleh Fasyankes Pemerintah	Jumlah tenaga kesehatan lulusan poltekkes kemenkes yang didayagunakan di fasyankes pemerintah	-	1.322	1.388	1.458	1.530
		Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Berprestasi							
			Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Poltekkes Kemenkes Tingkat Nasional	Jumlah mahasiswa berprestasi Poltekkes Kemenkes tingkat nasional	-	3.074	3.228	3.389	3.5592
A.1.c	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga								
		Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan							
			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pendidikan Sesuai Kebutuhan Pelayanan Kesehatan	Jumlah dokumen kajian kebutuhan pendidikan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan yang disusun	-	207	217	228	240
			Penyusunan Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen peta jalan pengembangan pendidikan tenaga kesehatan yang disusun	-	508	-	-	-
			Fasilitasi Penyesuaian Program Studi Pendidikan SDM Kesehatan	Jumlah program studi pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan	-	362	380	399	419
			Fasilitasi Penyesuaian Kelembagaan Institusi Poltekkes Kemenkes	Jumlah institusi Poltekkes Kemenkes yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan	-	1.411	1.482	1.556	1.633
			Fasilitasi Pelaksanaan Rintisan Kelas Internasional di Poltekkes Kemenkes	Jumlah program studi rintisan kelas internasional di Poltekkes Kemenkes	-	126	132	139	146

NO	PROGRAM/KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11
			Pengembangan Center of Excellent (CoE) Poltekkes Kemenkes	Jumlah Center of Excellent (CoE) Poltekkes Kemenkes	-	2.285	2.126	2.233	2.344
		Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes Yang Meningkatkan Status Akreditasinya							
			Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Kemenkes	Jumlah Poltekkes Kemenkes Mendapatkan Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	-	66	69	73	76
			Pembinaan Audit Mutu Internal (AMI) Poltekkes Kemenkes	Jumlah Poltekkes Kemenkes Yang Mendapatkan Pembinaan Audit Mutu Internal (AMI)	-	399	419	440	462
			Pendampingan dan Pembinaan Akreditasi Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes	Jumlah lembaga yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan akreditasi Prodi dan/atau Institusi Poltekkes Kemenkes dan meningkat status akreditasinya	-	120	126	132	139
			Workshop Persiapan Akreditasi Internasional	Jumlah Prodi dan/atau Institusi Poltekkes Kemenkes yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam persiapan akreditasi internasional	-	997	1.047	1.099	1.154
			Sinkronisasi Data Prodi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan Dengan PD Dikti	Jumlah Poltekkes Kemenkes Yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Dalam Rangka Sinkronisasi Data Prodi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan Dengan PD Dikti	-	265	278	292	307
			Sinkronisasi Data Tracer Study Poltekkes Kemenkes	Jumlah Poltekkes Kemenkes yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan tracer study	-	48	50	53	56
			Pembinaan Akreditasi Perpustakaan Poltekkes Kemenkes	Jumlah Poltekkes Kemenkes yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan akreditasi perpustakaan	-	107	112	118	124
			Pembinaan Akreditasi Laboratorium di Poltekkes Kemenkes	Jumlah Poltekkes Kemenkes yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan akreditasi laboratorium	-	177	186	195	205

NO	PROGRAM/KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11
			Evaluasi Pemenuhan Standar Laboratorium di Poltekkes Kemenkes	Jumlah laporan evaluasi pemenuhan standar laboratorium di Poltekkes Kemenkes	-	245	257	270	284
			Evaluasi Penyelenggaraan Akreditasi Sebagai Upaya Untuk Pencapaian Akreditasi Unggul	Jumlah laporan evaluasi penyelenggaraan akreditasi sebagai upaya untuk pencapaian akreditasi unggul	-	815	856	899	943
			Pertemuan Koordinasi Nasional Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	Terlaksananya kegiatan Pertemuan Koordinasi Nasional Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	-	1.289	1.353	1.421	1.492
		Poltekkes Kemenkes Yang Mengimplemantasikan Pembelajaran sesuai Dengan SN-DIKTI							
			Pengembangan pembelajaran Daring di Poltekkes Kemenkes	Jumlah lembaga (Poltekkes Kemekes) yang memanfaatkan pembelajaran daring	-	801	841	883	927
			Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan	Jumlah lembaga yang mendapatkan bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan	-	600	630	662	695
			Integrasi Sistem Informasi Akademik Poltekkes Kemenkes Terpadu (SIKAD ENTERPRISES)	Jumlah Lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang datanya terintegrasi pada DASHBOARD SIKAD	-	978	1.027	1.078	1.132
			Langganan Referensi Elektronik Bagi Poltekkes Kemenkes	Jumlah lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang mendapatkan akses referensi elektronik	-	5.447	5.719	6.005	6.306
		Poltekkes Kemenkes Yang Meningkatkan Kinerja Publikasi, Penelitian dan Pengabmasnya							
			Bimbingan Teknis Penelitian dan Publikasi Ilmiah Poltekkes Kemenkes	Jumlah lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang mendapatkan bimbingan teknis penelitian dan publikasi	-	1.018	1.069	1.122	1.178
			Seleksi Penelitian Penugasan Poltekkes Kemenkes	Jumlah proposal penelitian yang lolos seleksi penelitian penugasan Poltekkes Kemenkes	-	3.096	3.251	3.414	3.584

NO	PROGRAM/KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11
			Insentif Luaran Hasil Penelitian Poltekkes Kemenkes	Jumlah proposal penerima insentif luaran hasil penelitian Poltekkes Kemenkes	-	432	454	476	500
			Bimbingan Teknis Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset Poltekkes Kemenkes	Jumlah lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang mendapatkan bimbingan teknis pengabdian masyarakat	-	357	375	394	413
			Seleksi Pengabdian Masyarakat Unggulan Poltekkes Kemenkes	Jumlah proposal pengabdian masyarakat yang lolos seleksi pengabdian masyarakat penugasan Poltekkes Kemenkes	-	82	86	90	95
			Penguatan Konsep Pembinaan Wilayah Poltekkes Kemenkes (Desa Binaan)	Jumlah Lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang mendapatkan penguatan konsep pembinaan wilayah	-	451	474	497	522
			Edu Health Fair	Jumlah lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang berpartisipasi dalam kegiatan Edu Health Fair	-	1.193	1.253	1.315	1.381
		Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama Poltekkes Kemenkes							
			Manajemen Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama Poltekkes Kemenkes	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes	-	284	298	313	329
			Monitoring dan Evaluasi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama Poltekkes Kemenkes	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi seleksi penerimaan mahasiswa baru bersama Poltekkes Kemenkes	-	109	114	120	126
		Klasterisasi Poltekkes Kemenkes							
			Klasterisasi Poltekkes Kemenkes	Jumlah lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang mendapatkan penilaian dalam klasterisasi poltekkes kemenkes	-	46	49	51	53
A.1.d	Kebijakan Bidang Kesehatan								
		Kebijakan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan							

NO	PROGRAM/KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11
			Kebijakan pendidikan tinggi bidang kesehatan	Jumlah rekomendasi kebijakan pendidikan tinggi bidang kesehatan yang disusun	-	1.246	1.308	1.374	1.442
A.1.e	Standarisasi Produk								
		Bahan Ajar Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan Terstandar Nasional							
			Penyusunan Bahan Ajar Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan Terstandar Nasional	Jumlah bahan ajar pendidikan tinggi bidang kesehatan terstandar nasional yang disusun	-	775	1.196	1.256	1.320
		Soal Uji Kompetensi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan							
			Workshop Item Development	Jumlah orang yang mengikuti workshop item development	-	190	200	209	220
			Workshop Item Review	Jumlah orang yang mengikuti workshop item review	-	322	338	355	373
			Penyusunan Soal Uji Kompetensi Nasional Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	Jumlah kelompok soal uji kompetensi pendidikan tinggi tenaga kesehatan (Berdasarkan Jenis Pendidikan) yang disusun	-	2.084	2.188	2.298	2.412
			Pelaksanaan Try Out Uji Kompetensi Nasional Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan	Jumlah lembaga yang mengikuti try out uji kompetensi nasional pendidikan tinggi tenaga kesehatan	-	3.045	3.197	3.357	3.525
			Monitoring dan Evaluasi Uji Kompetensi Nasional Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi uji kompetensi nasional pendidikan tinggi tenaga kesehatan	-	182	191	201	211
A.1.f	Kerjasama								
		Kerjasama dan Kemitraan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan							
			Kerjasama dan Kemitraan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	Jumlah dokumen kerjasama dan kemitraan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	-	5.623	5.904	6.199	6.510

NO	PROGRAM/KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11
			Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pendidikan Tenaga Kesehatan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kerjasama pendidikan tenaga kesehatan	-	186	195	205	215
A.1.g	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria								
		NSPK Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan							
			Penyiapan Bahan Kurikulum Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	Jumlah kurikulum inti pendidikan tinggi bidang kesehatan yang disusun	-	181	190	200	210
			Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Jumlah standar sarana dan prasarana pembelajaran yang disusun	-	74	78	82	86
			Penyusunan Petunjuk Teknis/Pedoman Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	Jumlah petunjuk teknis/pedoman pendidikan tinggi bidang kesehatan yang disusun	-	1.009	1.059	1.112	1.168
			Pendampingan Penyusunan Statuta Poltekkes Kemenkes	Jumlah Statuta Poltekkes Kemenkes yang disusun	-	360	-	-	-
A.1.h	Pelatihan Bidang Pendidikan								
		Dosen dan Tenaga Kependidikan Yang Ditingkatkan Kompetensinya							
			Penyusunan Kurikulum dan Modul Peningkatan Kapasitas	Jumlah kurikulum dan modul peningkatan kapasitas yang disusun	-	454	477	501	526
			Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan Melalui Pelatihan, Workshop dan Short Course	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan, workshop dan short course	-	10.377	10.896	11.441	12.013
			Pemagangan Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti program magang	-	3.170	3.329	3.495	3.670
			Penilaian dan Pelaksanaan Dosen Berprestasi	Jumlah dosen berprestasi yang mendapatkan pelatihan pada pemilihan dosen berprestasi	-	809	849	892	937
A.1.i	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah								
		Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah							

NO	PROGRAM/KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11
			Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah Provinsi Papua	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan wilayah	-	1.277	1.341	1.408	1.478
A.1.j	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat								
		Pengabdian Masyarakat Unggulan Poltekkes Kemenkes							
			Pengabdian Masyarakat Unggulan Poltekkes Kemenkes	Jumlah pengabdian masyarakat unggulan Poltekkes Kemenkes	-	1.480	1.554	1.632	1.713
A.1.k	Penelitian	Penelitian Penugasan Poltekkes Kemenkes							
			Penelitian Penugasan Poltekkes Kemenkes	Jumlah pembiayaan penelitian penugasan Poltekkes Kemenkes	-	1.625	1.625	1.625	1.625
B	Program Dukungan Manajemen				-	5.429	5.700	5.985	6.285
B.1	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan				-	5.429	5.700	5.985	6.285
B.1.a	Layanan Perkantoran								
		Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pusat Pendidikan SDM Kesehatan							
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Persentase realisasi anggaran operasional dan pemeliharaan kantor	-	2.136	2.243	2.355	2.473
B.1.b	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal								
		Rencana Program dan Anggaran Pusat Pendidikan SDM Kesehatan							

NO	PROGRAM/KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11
			Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran Pusat Pendidikan SDM Kesehatan yang disusun	-	338	355	373	391
B.1.c	Layanan Umum								
		Layanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan							
			Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan	Jumlah layanan umum, rumah tangga dan perlengkapan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan sebanyak 1 layanan	-	1.255	1.318	1.384	1.453
B.1.d	Layanan Sarana Internal								
		Layanan Sarana Internal Pusat Pendidikan SDM							
			Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Pusat Pendidikan SDM Kesehatan sebanyak 200 unit.	-	384	403	423	445
			Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran Pusat Pendidikan SDM Kesehatan sebanyak 49 unit	-	30	32	33	35
B.1.e	Layanan SDM								
		Layanan Kepegawaian Pusat Pendidikan SDM Kesehatan							
			Pengelolaan Kepegawaian	Jumlah pegawai Pusat Pendidikan SDM Kesehatan yang mendapatkan layanan kepegawaian sebanyak 72 orang	-	153	161	169	177
B.1.f	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal								
		Layanan Monev dan Pengelolaan Keuangan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan							

NO	PROGRAM/KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11
			Monitoring dan Evaluasi Internal	Jumlah laporan kinerja Pusat Pendidikan SDM Kesehatan yang disusun sebanyak 10 laporan	-	127	133	140	147
			Penyusunan Laporan Keuangan dan Perbendaharaan	Jumlah laporan keuangan dan BMN Pusat Pendidikan SDM Kesehatan yang disusun sebanyak 5 laporan	-	134	141	148	155
B.1.g	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal								
		Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal Pegawai Pusat Pendidikan SDM Kesehatan							
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	Jumlah pegawai yang mendapatkan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan dan workshop	-	872	916	961	1.009

LAMPIRAN 4

KERANGKA REGULASI RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENDIDIKAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait /Institusi	Target Penyelesaian
1	R. Permenkes tentang Program Afirmasi Pendidikan Kesehatan	Regulasi sejalan dengan UU Nomor 12 Tahun 12 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 74 ayat 1 bahwa PTN wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi dan ayat 2 bahwa Program Studi yang menerima calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau Masyarakat.	Badan PPSDM Kesehatan	Kemdikbud, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kemendagri, Kemenpan & RB 2020	2020

MATRIKS FORMULASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PUSDIK SDM KESEHATAN TAHUN 2020-2024

NO	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Baseline Data (Capaian 2018)	Target					Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024				
1	Kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan	Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK										Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
		Jumlah Penerima Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK		0	500	1.000	1.500	1.500	Jumlah penerima bantuan biaya pendidikan afirmasi diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	Jumlah peserta penerima bantuan biaya pendidikan afirmasi diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	SK penerima bantuan biaya pendidikan sesuai dengan hasil seleksi	
		Penyesuaian prodi dan lembaga pendidikan SDM Kesehatan										
		Jumlah Prodi dan lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan*(kumulatif)		52	104	156	208	260	Jumlah prodi dan atau lembaga pendidikan bidang kesehatan yang disesuaikan baik secara kuantitas dan kualitas dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan	Jumlah prodi dan atau lembaga pendidikan bidang kesehatan yang disesuaikan baik secara kuantitas dan kualitas dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan - Penyesuaian secara kuantitas berupa penambahan (jumlah dan jenis) program studi, pembatasan kuota penerimaan mahasiswa baru, pembatasan pembukaan program studi baru, serta penutupan program studi yang sudah jenuh, disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan. - Penyesuaian secara kualitas dilakukan dengan cara mendorong perguruan tinggi bidang kesehatan dan program studi di dalamnya untuk meningkatkan status akreditasinya khususnya untuk mencapai akreditasi unggul, pengembangan Pusat Unggulan Ipteks Poltekkes Kemenkes (PUI-PK), pengembangan kelas Internasional; dan perluasan kerjasama dengan mitra di dalam dan di luar negeri	Surat rekomendasi penyesuaian prodi, SK Pendirian Prodi, Hasil Penilaian Akreditasi, SK Pengembangan PUI-PK, SK Kelas Internasional dan MoU/MoA	

